

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Feri Amsari, *Et. Al.* 2022. *Konstitusional dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Padang.

H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer

_____, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Jurdi Fajlurrahman, 2018, *Penghantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.

Miriam Budiarjo, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rafly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

_____, 2024, *Tata Kelola Pemilu Electoral Governance*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Ramlan Surbakti *Et. Al.*, 2011, *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*. Jakarta: Kemitraan Partnerships.

_____, *Et. Al.*, 2015, *Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil*, Kemitraan Partnerships, Jakarta

Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2021, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saldi Isra, 2022, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

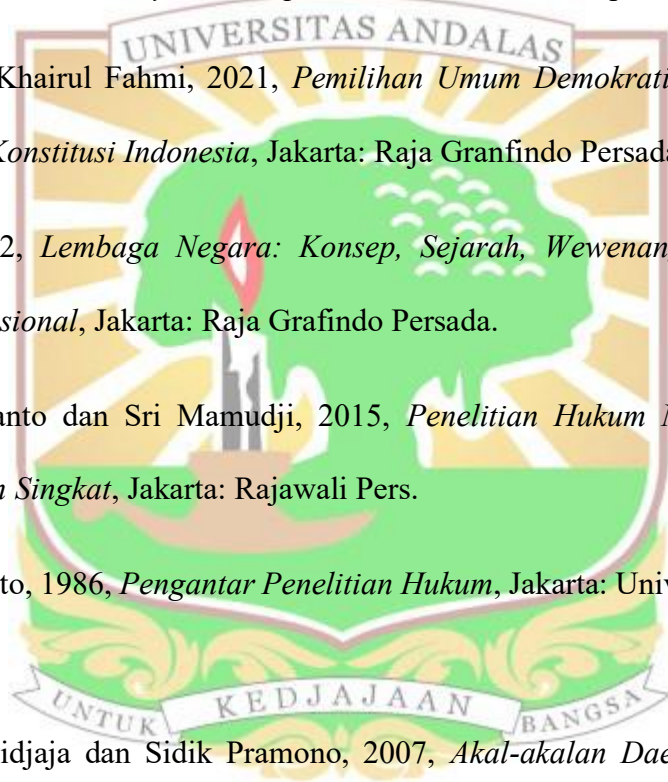
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Pipit R Kartawidjaja dan Sidik Pramono, 2007, *Akal-akalan Daerah Pemilihan*, , Berlin dan Jakarta, BP Perludem

International IDEA, 2005, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Jakarta, International IDEA.

International IDEA, 2002, *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Stockholm, International IDEA.



International IDEA, 2012, *Deepening in Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*, Stockholm, International IDEA.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.

A. Rahman HI., 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2022.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2023.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022.

D. Jurnal

Aryo Wasisto, Dampak Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terhadap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Daerah Pemilihan, Jurnal DPR RI, Vol 1 No 1, 2023.

Dri Sucipto, Oman Sukmana, Wahyudi, Nirwan Moh. Nur, 2024, “Penerapan Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Edrakin Hayckle, “Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Bawaslu”, *Jurnal Administrasi Negara Universitas Padjajaran*, Volume 16, Nomor 1, 2024.

Jimly Asshiddiqie, “Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006.

Khairul Fahmi, Giffa Lania, “Pemenuhan Keabsahan Dokumen Syarat Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 3, 2026.

_____, M Revan Fauzano, 2022, “Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik”, *Jurnal of Social and Policy Issues*. Vol.2 No.2, 2022.

_____, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945”, *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol.4 No.2 2016.

_____, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No. 3, 2010.

Maruarar Siahaan,” Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2009.

Pippa Norris, "The New Research Agenda Studying Electoral Integrity," *Electoral Studies*, Vol. 32, No. 4, 2013.

Rini kusmawanty, Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Metode Klasifikasi Pembelajaran Mesin Citra Satelit Landsat 8 Di Kota Bogor, *Jurnal Pembangunan daerah*, vol 2 no 1, 2023

Rahmat Hidayat, "Urgensi penguatan partisipasi public dalam pemilu:peran KPU dan BAWASLU dalam konteks demokrasi Indonesia", *Indonesian Journal of Intelctual Publication*, Volume 5 Nomor 3, IJI Publication: Yogyakarta, 2025.

Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Ikhtiar Peningkatan Keterwakilan melalui Pembentukan Dapil Luar Negeri: Evaluasi terhadap Pemilu", *Jurnal Proseding Seminar Hukum Aktual*, 2024.

E. Internet

Ramlan Surbakti, Demokrasi dan Pembentukan Daerah Pemilihan, <https://nasional.kompas.com/read/2013/03/18/02271135/demokrasi.dan.pembentukan.daerah.pemilihan?page=all>.

Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://ppid.dpr.go.id/index/publik/id/1>

Elisabeth Carter dan David M. Farrell, Electoral Systems and Electoral Management www.researchgate.net/publication/237654779,

Perludem Sebut dapil yang tak di Tata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/07/17462531/perludem-sebut-dapil-tak-ditata-ulang-berpotensi-lahirkan-sengketa-peserta..>

Membaca Kembali Putusan MK 80/2022 tentang dapil.

<https://rumahpemilu.or.id/membaca-kembali-putusan-mk-80-2022-tentang-dapil/>.

Peta Resmi Konstituensi Majelis Republik Nomor 1/2025, Komisi Pemilihan Nasional, [DR125-001-00001-118847132-058_001_2025.pdf](#) (Dalam Bahasa Portugis).

Pemilu Indonesia belum adil,

<https://nasional.kompas.com/read/2026/06/02/15410331/eks-ketua-kpu-ke-dpr-pemilu-indonesia-bebas-tetapi-belum-adil>,

Penjelasan KPU soal tak ada perubahan dapil DPR-DPRD di 2024,

<https://news.detik.com/pemilu/d-6523106/penjelasan-kpu-soal-tak-ada-perubahan-dapil-dpr-dprd-di-2024> .

KPU setuju dapil pemilu tidak diubah, <https://republika.id/posts/36378/kpu-setuju-dapil-pemilu-tidak-diubah> .

Komisi II DPR hingga KPU sepakat dapil pemilu DPR-DPRD Provinsi tak berubah di 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-6511519/komisi-ii-dpr-hingga-kpu-sepakat-dapil-dpr-dprd-provinsi-tak-berubah-di-2024>

F. Risalah

Risalah Rapat Kerja (ke-1) Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, tanggal 26 Agustus 2002.

G. Ensiklopedia

Ensklopedia Ace Project,

[Encyclopedia,https://aceproject.org/aceen/topics/ei/eif/eif09/eif09c/default](https://aceproject.org/aceen/topics/ei/eif/eif09/eif09c/default),

Wikipedia, daerah pemilihan di Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_daerah_pemilihan_nasional_Indonesia

H. Rilis Lembaga Pemerintahan

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, *Sulawesi Barat Dalam Angka 2004*.

BPS Provinsi Sulawesi Barat.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2020, *Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2020*, Bpssulsel, Makassar.

